

Peningkatkan Upaya Sikap Moral Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Untuk Memperbaiki Kualitas Kesejahteraan Masyarakat

Albert Richardo; Julius Marcelino; Jonathan, Universitas Pradita,
jonathan@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: Welfare is a condition where people get the necessities of life and their rights. Therefore welfare in society is very important, currently the quality of social welfare is declining because the moral attitude in society has also decreased. Moral attitude is an individual attitude that can distinguish between right and wrong. The decline in moral attitudes can lead to bad actions, such as corruption. Corruption is an act that violates rules or norms by taking and misusing state or company money for personal or group interests with the aim of gaining personal or group benefit. The KPK noted in 2020, that corruption cases in Indonesia reached 66 investigations, 60 investigations, 71 prosecutions, 59 inkracht cases and executed 51 cases. The impact of corruption is that it can worsen the quality of society and the state in all aspects. Therefore it is necessary to improve the moral attitude of society to prevent corruption so that people's welfare improves. The research will focus on explaining corruption, previous corruption cases and prevention in the form of anti-corruption. The research aims to explain the dangers of corruption and improve people's moral attitudes to improve people's welfare. The research method in this research is qualitative with literature study data collection techniques through observation, observations in scientific journals, articles and websites related to corruption. It can be concluded that morals are very important in one's life, things that disturb society are bad behavior caused by a decrease in moral attitudes, an example is corruption. Corruption is very dangerous for the younger generation, politics, economy and bureaucracy. Therefore, to improve the moral quality of society, anti-corruption can be implemented in the life of the community itself. There is also the Ministry of Education and Culture's Anti-Corruption Education program which aims to prevent corruption.

KEYWORDS: Moral attitudes, Society, Welfare, Corruption.

ABSTRAK: Kesejahteraan adalah kondisi dimana masyarakat mendapatkan kebutuhan hidup dan hak mereka. Maka dari itu kesejahteraan dalam bermasyarakat sangat penting, saat ini kualitas kesejahteraan masyarakat sedang turun karena sikap moral pada masyarakat juga mengalami penurunan. Sikap moral adalah sikap individu yang dapat membedakan mana yang baik dan salah. Merosotnya sikap moral dapat mengakibatkan perbuatan yang buruk, seperti korupsi. Korupsi adalah tindakan yang melanggar aturan atau norma-norma dengan mengambil dan penyalahgunaan uang negara maupun perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan tujuan mendapatkan keuntungan sendiri atau kelompok. KPK mencatat pada tahun 2020, bahwa kasus korupsi di Indonesia sampai 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkracht dan mengeksekusi

51 perkara. Dampak dari korupsi adalah dapat memburuk kualitas masyarakat dan negara dalam segala aspek (Tahun Periode). Oleh karena itu perlunya melakukan peningkatan terhadap sikap moral masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi agar kesejahteraan masyarakat membaik. Penelitian akan berfokus pada penjelasan korupsi, kasus-kasus korupsi yang terjadi sebelumnya dan pencegahan berupa anti korupsi. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan bahayanya korupsi dan meningkatkan sikap moral masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka melalui observasi, pengamatan pada jurnal ilmiah, artikel dan website yang berhubungan dengan korupsi. Dapat disimpulkan moral sangatlah penting dalam kehidupan seseorang, hal yang mengganggu masyarakat adalah perilaku buruk yang disebabkan menurunnya sikap moral, contohnya adalah korupsi. Korupsi sangat berbahaya terhadap generasi muda, politik, ekonomi dan birokrasi. Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas moral masyarakat dapat menerapkan anti korupsi di kehidupan masyarakat itu sendiri. Juga terdapat program Kemendikbud Pendidikan Anti Korupsi yang bertujuan mencegah korupsi.

KATA KUNCI: Sikap moral, Masyarakat, Kesejahteraan, Korupsi.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertujuan untuk bisa berinteraksi dengan sesama masyarakat (Yolanda, 2019). Dalam masyarakat terdapat Moral yang merupakan suatu hal yang penting, dengan menjaga atau meningkatkan sikap moral dapat membantu kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Moral dalam masyarakat juga mencerminkan kepribadian dalam suatu negara (Anjarwati, 2020). Permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat mengalami penurunan moral yang menyangkut dengan kejujuran dan keadilan. Karena adanya pergeseran nilai-nilai norma masyarakat, akan membawa perubahan bagi masyarakat sekitar terutama generasi muda yang suka berbohong, bicara kasar, serta melawan orang tua, dampak dari penurunan moral bisa berupa munculnya kekerasan, pencurian, mengabaikan peraturan yang diterapkan, bahasa kasar, kejahatan seksualitas, dan merusak diri sampai penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan yang kurangnya menjaga moral dalam masyarakat yang sangat penting, terutama dalam sikap moral dalam korupsi yang dimana sangat merugikan banyak masyarakat sekitar.

Menurut Nurdjana, kata korupsi berasal dari kata Yunani “*corruptio*” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, berbahaya, korup, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, kejiwaan, dan hukum (Nurdjana, 2009).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang sudah dijelaskan di dalam 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 sampai UU No. 20 Tahun 2001. dalam pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Dalam 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 sampai UU No. 20 Tahun 2001 menerangkan secara lengkap tentang perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena melakukan korupsi (Memahami untuk Membasmi (Buku Panduan untuk memahami tindak pidana korupsi), 2006).

Berdasarkan kompas.com, Issha Harruma menyatakan bahwa Korupsi merupakan cara menyalahgunakan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dampak dari korupsi bersifat negatif yang tertuju pada masyarakat dan negara, yaitu terhambat pertumbuhan ekonomi, penurunan produktivitas, menurun pendapatan

negara, meningkatnya angka kriminalitas, dan solidaritas sosial yang mengurang. Pada saat ini, KPK mencatat pada tahun 2020, bahwa kasus korupsi di Indonesia telah sampai 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkracht dan mengeksekusi 51 perkara (*Data Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun 2022*).

Upaya pemberantasan dalam korupsi, masyarakat sudah melakukan sejak awal walaupun aturan anti korupsi sudah diperketat. Korupsi sikap yang buruk, yang berakibat sangat bahaya bagi masyarakat, dari aspek kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan kehidupan birokrasi (Setiadi, 2018). Hubungan korupsi antar moral adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, yang bisa diartikan dengan masalah setiap sikap orang yang mengambil atau merugikan banyak orang yang sudah menjadi hak orang lain (Hartanto, n.d). Maka dari itu perlu diberlakukan hukum bagi orang yang korupsi. Hukum tanpa moralitas juga menjadikan hukum tiada artinya (*Moralitas Pemberantasan Korupsi*, 2021).

Untuk mengatasi problematika tersebut, maka diperlukan Moral untuk meningkatkan sikap masyarakat dalam mencegah korupsi untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat,. Maka dari itu kami tertarik untuk memilih judul “Peningkatan Upaya Sikap Moral Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Memperbaiki Kualitas Kesejahteraan Masyarakat”. Lewat jurnal ini tim penulis berharap sikap moral masyarakat dapat meningkat untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus terhadap beberapa buku mengenai moralitas dan korupsi yang telah tersebar luas di Internet. Salah satunya adalah buku mengenai sikap korupsi yang membuat moral masyarakat buruk dan menjatuhkan wibawa bangsa sehingga dapat merenggut kesejahteraan rakyat.

Selain buku, tim peneliti juga melakukan pengamatan pada jurnal-jurnal ilmiah yang telah ada di internet serta studi pustaka terhadap kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya. Selain dari jurnal dan buku-

buku, tim peneliti juga memperoleh informasi dari website resmi KPK dan lainnya dan berita dari media online terkait upaya pencegahan korupsi demi meningkatkan sikap moralitas masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan Korupsi

Bahasa latin dari korupsi adalah *corruptio* atau *corruptus* yakni sesuatu tindakan yang merugikan, merusak bahkan menghancurkan kehidupan bermasyarakat. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan orang lain bahkan pribadi.

Menurut World bank pada tahun 2000, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (Mengenal Pengertian Korupsi, 2022).

Pada korupsi memiliki 5 komponen yaitu korupsi pada suatu perilaku, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, melanggar hukum atau menyimpang dari norma norma yang sudah disahkan dan dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta (Mengenal Pengertian Korupsi, 2022).

Pada korupsi itu sendiri terdapat jenis-jenisnya yaitu *Bureaucratic Corruption*, adalah sebuah korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dalam bentuk menerima dan meminta suap dalam jumlah relatif kecil dan *Political Corruption* adalah sebuah korupsi yang terjadi pada pejabat tinggi serta penegak hukum itu sendiri, yang melibatkan uang relatif besar. Jenis korupsi lainnya seperti kerugian keuangan negara, pembuatan curang, pemerasan, kepentingan dalam pengadaan, dan lain-lain (Mengenal Pengertian Korupsi, 2022).

B. Bahaya dalam Korupsi

Dalam korupsi terdapat beberapa masalah yang berbahaya sebagai akibat dari korupsi (Setiadi, 2018), diantaranya ada:

1. Bahaya korupsi dalam bermasyarakat

Korupsi terjadi pada masyarakat akan mengakibatkan masyarakat yang kacau dan berantakan, menjadikan masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri padahal manusia adalah makhluk sosial yang saling bantu membantu, tanpa adanya kepentingan diri sendiri pada bermasyarakat.

2. Bahaya korupsi pada generasi muda

Salah satu efek negatif yang berjangka panjang adalah pada generasi muda yang memiliki masa depan dalam bermasyarakat itu sendiri, yang dimana semakin lama dibiarkan, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi itu adalah hal yang biasa yang dilakukan, sehingga pengebangan pada bermasyarakat akan negatif dan rusak dengan sikap yang kompromi bahkan tidak jujur dalam segala apapun itu.

3. Bahaya korupsi pada politik

Kekuasaan politik yang lebih tinggi dalam masyarakat seperti pemilu yang curang, kekerasan pada pemilu dan lain lain yang dalam merusak demokrasi di dalam masyarakat sekitar. Dalam hal ini bisa menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintah secara tidak terhormat.

4. Bahaya korupsi pada ekonomi bangsa

Korupsi yang bisa merusak negara bahkan bangsanya sendiri yang mengakibatkan berkurangnya investasi dari keuangan dalam negeri dan luar negeri, karena para investor akan menganggap untuk membayar 2 kali untuk membayar bunga yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan para investor merasa dirugikan.

5. Bahaya korupsi pada birokrasi

Korupsi yang menyebabkan tidak efisien dalam pelayanan yang diberikan, tidak rasional, bahkan tidak berkualitas, yang kemungkinan bisa terjadi resesahan sosial bahkan jatuhnya para birokrat pada masyarakat sekitar.

C. Hambatan Korupsi

Dalam korupsi terdapat beberapa hambatan sebagai akibat dari korupsi (Setiadi, 2018), diantaranya yaitu:

1. Hambatan Struktural

Sebuah hambatan yang bersumber dari pemerintah yang membuat aturan penanganan tindakan korupsi tidak berjalan secara lancar. Lemahnya dalam koordinasi antar aparat penegak dan aparat pengawasan dan juga lemahnya sistem pengendalian dalam rendahnya kualitas layanan publik serta pengelolaan kekayaan negara.

2. Hambatan Kultural

Sebuah hambatan yang bermula dari kebiasaan negatif yang sudah dilakukan masyarakat sekitar, disebabkan karena kurangnya terbuka pimpinan instansi dan rendahnya komitmen untuk bisa mengatasi korupsi secara tegas, adil bahkan sikap yang pesimis (tidak memperdulikan apapun yang herbungungan dengan korupsi).

3. Hambatan Instrumental

Hambatan yang bersumber dari pendukung pada peraturan perundangan yang membuat penanganan tindak korupsi tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegak hukum, serta sulit menemukan pembuktian yang asli terhadap tindakan pidana pada korupsi.

4. Hambatan Manajemen

Hambatan yang berasal dari prinsip-prinsip manajemen yang tidak dilakukan dengan baik, yang membuat penanganan tindakan korupsi berantakan, hal ini disebabkan karena kurangnya komitmen manajemen pemerintah dalam pengawasan, lemahnya koordinasi baik aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum, kurangnya dukungan teknologi informasi, serta kurangnya dukungan sistem dan prosedur yang disediakan di berbagai negara.

D. Kesejahteraan dalam Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua suku kata yaitu Kesejahteraan dan Masyarakat. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera. Kata sejahtera ini sendiri memiliki arti aman, sentosa, dan makmur, selamat. Kesejahteraan merupakan “Hal dalam keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman (kesenangan hidup dan sebagainya).

Masyarakat adalah kumpulan berbagai individu yang berkumpul dan hidup bersama dengan saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan yang menyebabkan masyarakat merasa aman, sentosa, makmur, dan selamat serta terlepas dari berbagai ragam ancaman (Apa yang dimaksud dengan Kesejahteraan Masyarakat? - Tanya Ilmu Sosial, 2020). Berikut ciri-ciri pokok masyarakat sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
4. Mereka merupakan sebuah sistem yang hidup secara bersama. Sistem kehidupan bersama ini menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat dengan satu sama lain

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam terbentuknya kesejahteraan tersebut, antara lain:

1. Keadaan perumahan yang mereka huni.
2. Ada tidaknya aliran listrik dan fasilitas untuk memperoleh air bersih.
3. Keadaan infrastruktur pada umumnya.
4. Tingkat pendapatan yang diperoleh merupakan beberapa faktor yang penting sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran pada masyarakat.

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yaitu keadaan rumah yang menjadi tempat tinggal, ada tidak fasilitas aliran listrik dan memperoleh air bersih, adanya sarana dan jembatan yang layak, dan tingkat pendapatan perkapita. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang cukup berpengaruh dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu faktor non ekonomi. Faktor ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang dilihat berdasarkan sosial maupun alam sekitar. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Pengaruh adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat
2. Keadaan iklim dan alam sekitar
3. Ada tidaknya kebebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat

Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan, diantaranya:

1. Komposisi umur penduduk
Faktor ini menjadi tolak ukur selain aspek pendapatan, tolak ukur yang dipakai adalah angka harapan hidup.
2. Distribusi pendapatan masyarakat
Penilaian suatu kesejahteraan penduduk tidak cukup hanya dengan dilihat dari besar kecilnya tinggi pendapatan perkapita tetapi harus memperhatikan distribusi pendapatan di kalangan penduduk.
3. Pola pengeluaran masyarakat
Alokasi pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat menjadi suatu tolak ukur untuk menilai kesejahteraan masyarakat.
4. Komposisi pendapatan nasional
Faktor ini dapat menjadi tolak ukur untuk kesejahteraan masyarakat karena dengan laporan pendapatan per kapita dalam proporsi pendapatan nasional bisa menjadi bahan atau suatu perspektif bagi masyarakat dalam menilai kesejahteraan tersebut.
5. Perbedaan masa lapang
Perbedaan masa lapang menjadi sumber bagi alat pembanding kesejahteraan masyarakat yaitu ketidaksempurnaan pendapatan perkapita.
6. Keadaan pengangguran
Pembangunan ekonomi memiliki tujuan agar dapat menciptakan kesempatan kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Untuk mendapatkan kesejahteraan pasti tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil untuk didapatkan, tidak perlu melakukan hal yang haram, sebab masih banyak yang halal yang bisa dilakukan dalam mencapai kesejahteraan, sehingga perlu memperhatikan indikator kesejahteraan, seperti berikut:

1. Jumlah dan pemerataan pendapat
2. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau
3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata
4. Banyak informasi perlu digunakan untuk secara lengkap menunjukkan taraf kemakmuran dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat suatu Negara.

E. Teori Moralitas

Dikutip dari buku ethics milik Aristoteles, moral dapat menjadi kunci yang diutamakan karena muncul dari keadilan yang sebelumnya merupakan anggapan dari masyarakat bahwa sifat keadilan berdimensi sosial. Konsep keadilan dan keutamaan moralitas sangatlah penting dalam peran sebagai penengah bagi manusia dalam kehidupan manusia karena berasal dari akal budi dan juga mempengaruhi pola pikir pemikir-pemikir hebat selanjutnya seperti Thomas Aquinas yang pada akhirnya mengaitkan moralitas dalam ruang lingkup atau bidang yang lebih nyata yaitu hukum.

Selain sebagai jalan tengah bagi manusia, keutamaan moral menjadi jalan tengah juga bagi pengambilan keputusan yang bijang yang diperlukan. (*Hukum Dan Moralitas Dalam Cakrawala Pemikiran Aristoteles*, 2020).

F. Contoh Kasus Korupsi di Indonesia

Hasil dari penelitian dengan menggunakan teknik kualitatif terdapat beberapa kasus yang berada di berita Indonesia, seperti:

Kejati Lampung telah periksa 80 saksi kasus korupsi DLH Bandarlampung

© Selasa, 1 November 2022 14:24 WIB



Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Bandarlampung, Selasa, (1/11/2022). (ANTARA/HO)

Pada berita ini menyatakan bahwa ada 80 saksi kasus korupsi DLH Bandar Lampung yang membuat kerugian negara dalam dugaan kasus tipikor pemungutan retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung (Kejati Lampung telah periksa 80 saksi kasus korupsi DLH Bandarlampung, 2022).

Dari tahun 2019 hingga tahun 2021, ditemukan di DLH Bandar Lampung bahwa hasil pemungutan retribusi tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah, tetapi digunakan untuk kepentingan lain dan keuntungan pribadi dan hal itu tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Pemungutan retribusi persampahan pada tahun 2019-2021 pada Dinas Lingkungan Hidup dikenakan target pemasukan retribusi dari pemungutan sampah dari Kota Bandar Lampung adalah

- a. Pada tahun 2019 target seharga Rp.12.050.000.000, tetapi pada realisasi seharga Rp.6.979.724.400.
- b. Pada Tahun 2020 target seharga Rp.15.000.000.000, tetapi pada realisasi seharga Rp.7.193.333.000,
- c. Pada Tahun 2021 target seharga Rp.30.000.000.000, tetapi pada realisasi seharga Rp. 8.200.000.000.

Kejagung Telah Panggil BAKTI soal Dugaan Korupsi BTS

Kominfo

Reporter: Arrijal Rachman
Editor: Francisca Christy Rosana

Minggu, 30 Oktober 2022 17:31 WIB



Base Transceiver Station, TEMPO/Gunawan Wikasoro

Pada berita kedua adalah kasus korupsi pada BTS (*base transceiver station*), Kominfo yang duga adanya sebuah tindakan pidana korupsi yang membuat merugikan negara dan masyarakat itu sudah cukup lama (Kejagung Telah Panggil BAKTI soal Dugaan Korupsi BTS Kominfo, 2022).

Total indikasi korupsi dari proyek BTS (yang senilai Rp 28,3 triliun) adalah sekitar Rp 10 triliun, tetapi jumlah kerugian negara masih dalam penyelidikan lebih lanjut, mulai dari berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan proyek.

G. Sikap Anti korupsi yang harus dibangun

Benang merah pada permasalahan korupsi di dalam masyarakat adalah sikap moral masing-masing individu karena penyebab korupsi ini

bisa terjadi dimana saja atas faktor eksternal (pengaruh orang luar) dan internal (pengaruh diri sendiri).

Maka dari itu agar memperbaiki kualitas bermasyarakat dengan mencegah korupsi itu sendiri adalah dengan mengetahui dan mempraktekkan sikap anti korupsi ini secara langsung di kehidupan masing-masing untuk kedepannya (Meningkatkan Kesadaran Untuk Berperilaku Anti Koruptif Berlandaskan Sembilan Nilai Anti Korupsi, n.d.), diantaranya adalah:

1. Jujur dalam Segala Hal

Salah satu hal yang sangat penting didalam moral bermasyarakat adalah kejujuran. Orang yang jujur sangat dihargai dan dipercaya dalam segala hal yang dilakukan, Jika tidak jujur akan sangat merugikan diri sendiri bahkan orang lain.

2. Disiplin sesuai Aturan yang Berlaku

Patuh dan Konsisten dalam melakukan atau segala sesuatu aturan. Hal itu juga salah satu cara terbaik untuk bisa menghormati peraturan yang sudah dibuat dan sah.

3. Bertanggung Jawab

Dalam segala hal diperlukan dalam hal kecil maupun hal besar apapun akan diberikan sanksi besar atau kecil adalah tanggung jawab. Hal itu sangat wajib dilakukan masyarakat agar bisa menjaga apa yang sudah dilakukan.

4. Peduli kepada Sesama

Salah satu hal sikap dan tindakan yang sangat penting, bukan untuk merugikan sesama melainkan peduli pada sesama. Sikap seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat dan lingkungan sekitar.

5. Berani berlaku Adil

Dengan berani dalam berlaku adil dalam segala hal, adalah salah satu cara untuk bisa mencegah korupsi pada masyarakat sekitar, keuntungannya sangat banyak terutama tidak merugikan orang lain.

6. Memperkuat Sistem Anti Korupsi

Memperkuat dengan mendesain ulang layanan publik terutama pada berhubungan dengan kegiatan pelayanan masyarakat dan memperkuat transparansi, pengawasan sanksi korupsi pada masyarakat.

H. Program Kemendikbud Pendidikan Anti Korupsi

Menurut Aidha selaku Direktur Jejaring Pendidikan KPK menyatakan bahwa hingga saat ini Negara Indonesia berada di angka 37 dari 100 hasil optimal yang dimana angka tersebut memiliki arti bahwa Indonesia masih memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi. Dengan begitu untuk bisa memperbaiki sistem yang tujuan untuk menutup celah-celah korupsi yang ada di sebuah sistem melalui gratifikasi, KPN, Mentoring, antikorupsi badan usaha, dan meningkatkan dengan cara mengedukasi masyarakat (*Pendidikan Antikorupsi Penting Untuk Mewujudkan Zona Integritas Di Perguruan Tinggi – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021*).

Maka dari itu Kemendikbud pendidikan membuat sebuah program pendidikan anti korupsi (Kemendikbud Berkomitmen Mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi, 2018), dengan tujuan Agar dapat menciptakan pemimpin masa depan yang bersih dari korupsi pada generasi muda (*Pendidikan Antikorupsi Penting Untuk Mewujudkan Zona Integritas Di Perguruan Tinggi – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021*). Dengan adanya kerja sama sangat erat antara Kemendikbud dengan KPK dapat mempercepat proses pemberantasan korupsi yang berada di negara Indonesia, dan bertekad membangun negara Indonesia bisa lebih maju, baik, dan masa depan Indonesia.

Dalam hal ini harus ada cara yang efektif dan efisien untuk bisa mengimplementasi program pendidikan anti korupsi ini, yaitu dengan cara:

1. Mempelajari pendidikan berkarakter dan budaya anti korupsi
2. Sepakat bersama sama untuk menjalankan pendidikan berkarakter dan budaya anti korupsi

Demokrat jenderal dari tiap kementerian dan lembaga membuat dan menyepakati rencana aksi dengan tujuan percepat implementasi pendidikan antikorupsi (*KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5783 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA P, n.d.*), yaitu:

1. Kebijakan yang mewajibkan pembelajaran yang mengintegrasikan

nilai-nilai pengembangan diri dan budaya antikorupsi ke dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan. Kebijakan diterapkan paling lambat Juni 2019.

2. Menyusun dan memasukkan bahan ajaran dengan nilai-nilai pembentukan karakter dan budaya antikorupsi di semua jenjang pendidikan
3. Mendukung implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dalam pelatihan pendidikan
4. Menyediakan sumber daya manusia, anggaran, dan lainnya yang memadai untuk melaksanakan rencana aksi pengembangan kepribadian dan budaya antikorupsi.
5. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dengan tujuan untuk mendukung efektivitas pembelajaran nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi
6. Melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, serta pelaksanaan manajemen pendidikan yang baik dan bersih.
7. Mensosialisasikan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi serta penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab di semua jenjang pendidikan
8. Memberikan dorongan kebijakan pendidikan yang bersih dan baik melalui manajemen sekolah (MBS) serta menerapkan transparansi informasi yang tersedia untuk publik melalui portal informasi, termasuk platform JAGA-KPK dengan tujuan mendorong keterbukaan informasi publik.

Menurut data KPK per 14 Maret 2022 menyatakan bahwa terdapat 372 peraturan kepala daerah dari hasil implementasi program kemendikbud pendidikan anti korupsi, atau bahkan bisa dikatakan sudah sekitar 68 persen dari total keseluruhan wilayah di negara Indonesia. Melalui direktorat jejaring pendidikan akan terus mendorong dalam mengimplementasi program anti korupsi di berbagai daerah. KPK juga telah menargetkan seluruh pemerintah daerah untuk mewajibkan implementasi program anti korupsi pada tahun 2023 mendatang (*Menegakkan Pendidikan Antikorupsi Di Indonesia, 2022*).

IV. KESIMPULAN

Salah satu hal yang penting dalam hidup adalah moral, dengan menjaga moral sangat membantu masyarakat di kehidupan sehari-hari. Terdapat 2 sikap dalam moral, yaitu perilaku baik atau perilaku buruk, dan hal yang mengganggu masyarakat adalah perilaku buruk yang dilakukan masyarakat, dengan begitu masyarakat bisa melakukan hal yang buruk, salah satu contohnya adalah korupsi.

Korupsi adalah sikap yang buruk yang hanya merugikan orang lain dan bahkan menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat, dan menyebabkan problematika pada sikap moral masyarakat. Terdapat banyak kasus yang berada di Indonesia yang ada di berita-berita, salah satunya seperti kasus korupsi DLH Bandar Lampung dan kasus korupsi BTS (*base transceiver station*) kominfo. Hal itu menyebabkan kerugian yang sangat pada masyarakat Indonesia terutama untuk negara Indonesia.

Hal itu menjadikan berbahaya dari korupsi terhadap generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi yang menyebabkan kurangnya efisien dan merugikan banyak orang sekitar serta meluasnya keresahan pada sosial dan ketidaksetaraan sosial. Maka dari itu, agar bisa meningkatkan kualitas moral dalam bermasyarakat, harus mengetahui dan menerapkan anti korupsi dan mengimplementasi di kehidupan masing-masing orang, diantaranya adalah jujur, bertanggung jawab, peduli kepada sesama dan berani untuk bisa berlaku adil dalam segala hal.

Salah satu program yang disediakan di Indonesia yaitu Program Kemendikbud Pendidikan Anti Korupsi, hal itu bertujuan untuk bisa mewujudkan Indonesia anti dari korupsi itu tersebut, dengan cara mempelajari sikap berkarakter pada pendidikan, mendukung implementasi anti korupsi dan lain sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

Acic KPK. (n.d.). *kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia*. Retrieved November 24, 2022, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

Acic KPK. (n.d.). *ayo kenali dan hindari 30 jenis korupsi*. Aclc.Kpk.Go.Id. Retrieved November 24, 2022, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi (Buku Panduan untuk memahami tindak pidana korupsi)*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nibraska Aslam. (n.d.). Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*.

pengelola web kemdikbud. (2018, December 12). *Kemendikbud Berkomitmen Mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi*. <https://www.kemdikbud.go.id/>.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/kemendikbud-berkomitmen-mewujudkan-pendidikan-anti-korupsi>

Laudia Tysara. (2020, November 2). *9 Penyebab Korupsi, Hambatan Pemberantasan, dan Pengertiannya Menurut Ahli*. <https://hot.liputan6.com/>.
<https://hot.liputan6.com/read/4397741/9-penyebab-korupsi-hambatan-pemberantasan-dan-pengertiannya-menurut-ahli>

Acic KPK. (2022, November 4). *Mengenai Pengertian Korupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsium/20220411-null>

Edelweis Lararenjana. (2020, May 15). *Faktor Penyebab Korupsi dan Hambatan Dalam Upaya Pemberantasannya*. <https://www.merdeka.com/>.
<https://www.merdeka.com/jatim/faktor-penyebab-korupsi-dan-hambatan-dalam-upaya-pemberantasannya-kln.html>

ayesharuth. (2020, April 1). *Apa yang dimaksud dengan Kesejahteraan Masyarakat?* <https://Www.Dictio.Id/>. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kesejahteraan-masyarakat/128100>

ayesharuth. (2020, April 1). *Apa yang dimaksud dengan Kesejahteraan Masyarakat?* <https://Www.Dictio.Id/>. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kesejahteraan-masyarakat/128100>

Arrijal Rachman, & Francisca Christy Rosana. (2022, October 30). *Kejagung Telah Panggil BAKTI soal Dugaan Korupsi BTS Kominfo*. <https://Bisnis.Tempo.Co/>.

<https://bisnis.tempo.co/read/1651077/kejagung-telah-panggil-bakti-soal-dugaan-korupsi-bts-kominfo>

Dian Hadiyatna. (2022, November 1). *Kejati Lampung telah periksa 80 saksi kasus korupsi DLH Bandarlampung*.

Hartanto. (2017). KORUPSI PERBUATAN TAK BERMORAL MENJATUHKAN WIBAWA BANGSA DAN MERAMPAS KESEJAHTERAAN RAKYAT. *Hartanto*.

Achmad Fauzi. (2021, December 10). *Moralitas Pemberantasan Korupsi*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/10/moralitas-pemberantasan-korupsi>

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM. (2019). *KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5783 TAHUN 2019 tentang PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN 2019*.

https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/SK_Dirjen_Pendis_Nomor_5783_Tahun_2019_Tentang_Pedoman_Implementasi_Pendidikan_Antikorupsi_Pada_PTKI_Tahun_2019.pdf

Aclc KPK. (2022, June 28). *Menegakkan Pendidikan Antikorupsi di Indonesia*. <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220627-null>